

PAJAK DAERAH

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NO. 02 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak-Pajak Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Pajak Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Pajak Daerah, dengan sistematika sebagai berikut;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Jenis Pajak;
 3. Pemungutan Pajak;
 4. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 5. Kedaluwarsa Penagihan;
 6. Pembukuan dan Pemeriksaan;
 7. Insentif Pemungutan;
 8. Ketentuan Khusus;
 9. Penyidikan;
 10. Ketentuan Pidana;
 11. Ketentuan Peralihan;
 12. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2011.

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NO. 03 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,dengan sistematika sebagai berikut;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Saat Pajak Terutang;
 6. Ketentuan Bagi Pejabat;
 7. Penetapan, Tata Cara Pembayaran, dan Penagihan;
 8. Penagihan;
 9. Pengurangan;
 - 10.Keberatan, Banding dan Gugatan;
 - 11.Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - 12.Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan;
 - 13.Kadaluwarsa;
 - 14.Ketentuan Khusus;
 - 15.Ketentuan Pidana;
 - 16.Penyidikan;
 - 17.Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2011.